

KEHIDUPAN ORANG ASLI PAPUA DI DISTRIK TIOM SETELAH PEMEKARAN KABUPATEN LANNY JAYA

THE LIFE OF INDIGENOUS PAPUANS OF DISTRIK TIOM AFTER THE DIVISION OF KABUPATEN LANNY JAYA

Yannice Luma Marnala Sitorus

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota – USTJ
nala_ustj2006@yahoo.co.id

Abstract

Development in the era of special autonomy Papua aims to improve the welfare of indigenous Papuans and the resources. The resources term is used in this development focuses on resources originating from outside Papua, especially on special autonomy funds from the central government (the concept of exogenous development). Resources originating from within Papua itself such as the social and cultural capital of indigenous Papuans that tend to be ignored. After nine years of implementation development there still has not improve the welfare of indigenous Papuans, especially who live in the central mountainous region of Papua. This research has used a case study approach and qualitative methods (descriptive analysis). The study was conducted on indigenous Papuans in Tiom District, Lanny Jaya Regency, one of the districts in the central mountainous region. The study shows the changing of indigenous Papuans in Tiom on social, culture and economic aspects after intensive development since division of Lanny Jaya District from Jayawijaya District in 2008. In other side, indigenous Papuans still are not same level of civilization with migrant community groups.

Keywords: Indigenous Papuans, Resources, Civilization

Abstrak

Pembangunan di era otonomi khusus Papua bertujuan meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua dan sumber daya. Sumber daya yang dimaksudkan dalam pembangunan ini difokuskan pada sumber daya yang berasal dari luar Papua, terutama pada dana otonomi khusus dari pemerintah pusat. Sumber daya yang berasal dari dalam Papua, seperti modal sosial dan budaya orang asli Papua yang cenderung diabaikan. Setelah sembilan tahun pelaksanaan ternyata masih belum meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua khususnya di wilayah pegunungan tengah di Papua. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus dan menggunakan metode kualitatif (analisa deskriptif). Studi dilakukan pada orang asli Papua di Distrik Tiom, Kabupaten Lanny Jaya, salah satu kabupaten di daerah pegunungan tengah. Hasil studi menunjukkan bahwa mulai ada perubahan sosial, budaya dan ekonomi orang asli Papua di Tiom setelah pembangunan yang intensif di sana atau sejak pemekaran Kabupaten Lanny Jaya dari Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2008. Pada sisi lain orang asli Papua masih belum berada pada tingkat peradaban yang setara dengan kelompok masyarakat pendatang di sana.

Kata kunci: Orang Asli Papua, Sumber Daya, Peradaban

Pendahuluan

Sejak Papua resmi masuk dalam NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), setelah PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) Papua pada tahun 1969, berbagai program pembangunan dengan berbagai pendekatan telah dijalankan. Program yang dijalankan tersebut ada yang bersifat *top down* hingga *bottom up*, dengan skala provinsi hingga skala kampung, menggunakan pendekatan karitatif hingga pendekatan peningkatan kapasitas (partisipatif). Namun, semua itu belum membuat orang asli Papua (OAP) menjadi berdaya. Lebih lanjut, Papua juga memperoleh otonomi khusus dari

pemerintah pusat pada tahun 2001. Namun, latar belakang Pemerintah Indonesia memberikan otonomi khusus pada Papua ditengarai adalah untuk meredam tuntutan merdeka yang diserukan oleh OAP. Berdasarkan sejarah yang dipahami sekelompok warga asli Papua, seharusnya Papua berdiri sebagai suatu negara sendiri terlepas dari NKRI (Materay, 2012).

Otonomi Khusus (otsus) adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua (UU No.21 Tahun

2001). Bagi pemerintah provinsi, dana otsus yang diberikan oleh pemerintah pusat masih tergolong kecil bila dibandingkan dengan kebutuhan nyata di Papua. Akses geografis yang sulit, harga barang-barang yang tinggi, dan kondisi sosial-budaya yang beragam membuat pembangunan di Papua sangat berat dan memerlukan biaya yang jauh lebih besar. Anggaran otsus dianggap kecil bila dibandingkan dengan kekayaan yang dimiliki Papua, antara lain bila dibandingkan dengan kontribusi yang dibayarkan oleh Freeport pada pemerintah pusat (Enembe, 2016).

Pembangunan pada era otsus di Papua bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan OAP dan sumber daya yang digunakan dalam pembangunan ini difokuskan pada sumber daya yang berasal dari luar Papua. Sumber daya tersebut khususnya pada dana otsus dari pemerintah pusat (konsep pembangunan eksogen). Sumber daya yang berasal dari dalam Papua sendiri, seperti modal sosial dan budaya OAP cenderung diabaikan. Setelah sekian lama dilaksanakan, pembangunan di sana masih belum bisa meningkatkan kesejahteraan OAP, terutama yang berada di wilayah pegunungan tengah di Papua. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua, yang mayoritas penduduknya merupakan OAP, masih yang terendah sepanjang tahun 2009-2013 bila dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia (BPS, 2014). Lebih lanjut, proporsi desa tertinggal di Papua tidak banyak berubah sejak tahun 2011 (89,5%) hingga 2014 (91,06%) (Kementerian PPN/BAPPENAS, 2015). Khusus untuk kabupaten-kabupaten yang berada di wilayah pegunungan tengah, IPM-nya lebih rendah jika dibandingkan dengan IPM di kabupaten-kabupaten wilayah pesisir Papua.

Orang Asli Papua

Menurut hasil sensus penduduk pada tahun 2010, total jumlah suku bangsa asal Papua di Indonesia adalah 2.693.630 jiwa (atau sekitar 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia) yang terbagi ke dalam sekitar 466 suku bangsa. Sekitar 17,51% bermukim di daerah perkotaan dan 82,49% bermukim di daerah perdesaan. Sebanyak 93,16% bermukim di Provinsi Papua Barat (387.816 jiwa) dan Papua (2.121.436 jiwa), sedangkan selebihnya tersebar di berbagai daerah di Indonesia (BPS, 2011). Pada tahun 2010, jumlah total penduduk di Provinsi Papua Barat dan Papua adalah 3.593.803 jiwa, yang terdiri dari 2.509.252 jiwa penduduk suku bangsa asal Papua (69,82%) dan 1.084.551 jiwa

penduduk pendatang (30,18%), (BPS, 2011). Secara fisik, perbedaan antara penduduk suku bangsa asal Papua dengan penduduk pendatang jelas terlihat—kulit berwarna lebih gelap dengan rambut keriting kecil merupakan identitas fisik OAP.

Orang asli Papua (OAP) adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui oleh masyarakat adat Papua (UU Otsus Papua Tahun 2001). OAP yang bermukim pada suatu wilayah tertentu—atau dikenal juga dengan sebutan kampung—menjalankan hukum dan peraturan adatnya sendiri (mempunyai konsep pemerintahan tradisional). OAP hidup dalam sistem kekerabatan dengan menganut garis keturunan ayah (patrilineal) dengan budaya berasal dari ras Melanesia, dan cenderung menggunakan bahasa daerah yang sangat dipengaruhi oleh alam laut, hutan, dan pegunungan.

Mengacu pada perbedaan topografi dan adat istiadat, penduduk asli Papua dapat dibedakan menjadi empat kelompok besar, yaitu (Djojosoekarto, dkk, 2008):

- (1) Penduduk daerah pantai dan kepulauan dengan ciri-ciri umum rumah di atas tiang (rumah panggung) dengan mata pencaharian menokok sagu dan menangkap ikan.
- (2) Penduduk daerah pedalaman yang hidup di daerah sungai, rawa, dan danau. Umumnya mereka bermata pencaharian menangkap ikan, berburu dan mengumpulkan hasil hutan;
- (3) Penduduk daerah pedalaman di lembah dan kaki gunung, umumnya bermata pencaharian berburu dan mengumpulkan hasil hutan.
- (4) Penduduk daerah dataran tinggi dengan mata pencaharian berkebun dan berternak secara sederhana.

Secara garis besar dikenal ada lima wilayah adat di Provinsi Papua (BAPPEDA Provinsi Papua, 2015), yaitu:

- Wilayah adat Mamta (bagian utara Provinsi Papua).
- Wilayah adat Saereri (kawasan Teluk Cenderawasih, Provinsi Papua).
- Wilayah adat Me-pago (kawasan dataran tinggi Provinsi Papua).
- Wilayah adat La-pago (kawasan dataran tinggi Provinsi Papua).
- Wilayah adat Ha-Anim (bagian selatan Provinsi Papua).

Gambar 1
Peta Wilayah Adat di Provinsi Papua



Sumber: BAPPEDA Provinsi Papua, 2015

Dikenal ada enam nilai budaya dasar yang berlaku umum di Papua, yaitu (Djojosoekarto, dkk, 2012):

- (1) Nilai tentang penumpukan modal atau kekayaan: kekayaan bagi masyarakat Papua lebih bersifat sosial, dan bukan ekonomi atau fungsional.
- (2) Nilai tentang pekerjaan: aktivitas kerja bukanlah semata aktivitas ekonomis, melainkan juga aktivitas sosial budaya.
- (3) Nilai tentang waktu: waktu adalah ruang tempat orang dapat mengalokasikan kegiatan sesuai kebutuhan yang ada. Waktu bukanlah peluang atau kesempatan untuk mengakumulasi aktivitas, sebagaimana yang menjadi standar pemahaman modern, sehingga penjadwalan serta pembagian waktu kerja secara serial dan terstruktur dianggap tidak terlalu penting.
- (4) Nilai tentang hubungan sosial: lebih merupakan relasi berbasis kerangka suku dan klan. Ini mempengaruhi berbagai aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi, dimana orientasi kerjasama lebih berbasis identitas kesukuan dan cenderung kurang terbuka kepada pihak luar karena tidak didasarkan pada basis manfaat dan keuntungan.
- (5) Nilai tentang tanah: tanah memiliki dua kategori; tanah pribadi (biasanya sangat terbatas) yang boleh dijualbelikan dan diwariskan, serta tanah adat (sebagian besar tanah di Papua) yang tidak dijualbelikan dan tidak diwariskan. Pemanfaatan tanah lebih

merupakan wewenang komunal, dan bukan personal.

- (6) Nilai tentang jaminan sosial: pertolongan atau bantuan yang diberikan seseorang kepada orang lain, dipahami sebagai tindakan timbal balik yang harus dibalas dengan cara yang seimbang.

Dalam perkembangannya, terjadi transformasi pada tiga aspek budaya Papua, yaitu penumpukan modal, pekerjaan, dan waktu, sedangkan tiga aspek lainnya tetap (lihat Tabel 1).

Tabel 1
Transformasi Budaya Papua

Aspek Budaya	Rigid	Fleksibel
Penumpukan Modal		√
Pekerjaan		√
Waktu		√
Hubungan Sosial	√	
Tanah	√	
Jaminan Sosial	√	

Sumber: Djojosoekarto, dkk, 2012

Berikut ini adalah perkembangan yang terjadi terkait dengan transformasi budaya tersebut di atas. Pada kampung-kampung yang dekat daerah perkotaan, masyarakatnya memiliki mata pencaharian yang bervariasi, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), pedagang, dan karyawan. Di wilayah ini juga mulai ada konflik tanah adat karena sumber daya alam mulai terbatas akibat pengaruh dari perkembangan kota. Sementara itu, pola hidup masyarakat pada kampung-

kampung di Papua yang jauh dari perkotaan adalah: (1) Pola hidup subsistensi, (2) Mata pencaharian adalah petani, berburu dan meramu hasil hutan karena sumber daya alam masih cukup tersedia, menjual hasil alam pada pihak luar yang datang ke sana dengan harga murah akibat keterbatasan informasi, dan dapat menghabiskan penghasilannya untuk keperluan sesaat (tidak menabung), (UNDP, 2005).

OAP di wilayah pegunungan sudah mulai menerapkan budidaya pertanian dengan teknologi yang lebih maju, misalnya kelompok petani kopi di Wamena. Terdapat perubahan budaya dalam bercocok tanam dari karakteristik penduduk asli wilayah pegunungan. Pada umumnya petani di sana merupakan petani teknologi sederhana yang menanam ubi jalar sebagai bahan pangan pokok. Kemudian mereka mulai berkembang dan belajar tentang budidaya pertanian dengan teknologi yang lebih maju.

Tentang sistem politik tradisional di Papua, Mansoben dalam Soeprapto (2013) menyebutkan ada empat sistem kepemimpinan, yaitu: (1) Sistem kepemimpinan pria berwibawa (*bigman*), (2) Sistem kepemimpinan ondoafi, (3) Sistem kerajaan, dan (4) Sistem kepemimpinan campuran. Sejarah peradaban penduduk asli Papua sebenarnya tidak pernah merasa harus tunduk pada suatu kekuasaan tertentu yang lebih besar di luar masyarakat adatnya. Banyaknya jumlah suku-suku atau masyarakat adat di Provinsi Papua yang mencapai hingga sekitar 250an menunjukkan ketiadaan suatu otoritas kekuasaan yang dominan di sana. Masyarakat kampung di Papua sebenarnya tidak mengenal eksistensi negara sebagai kekuasaan supra kampung (Diamond, 2015; Djojosoekarto, dkk., 2012; Suryawan, 2014). Kampung adalah bagian dari permukiman yang menjadi bagian dari komunitas adat serta tunduk pada aturan-aturan adat, termasuk dalam pengelolaan sumber daya (Djojosoekarto, dkk., 2012, hlm. 105). Kondisi politik dan pemerintahan di Papua menjadi relatif kurang stabil bila dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia (Diamond, 2015; Suryawan, 2014).

Di perkampungan Papua terdapat beberapa golongan masyarakat dengan karakteristik sebagai berikut (Sari, dkk., 2011, hlm.33-34).

(1) Kelompok elit kampung, yaitu kepala klan atau marga yang kuat dan sekaligus menjadi kepala kampung. Jaringan kekeluargaan 'diadopsi' ke dalam struktur pemerintahan

kampung. Kelembagaan kampung umumnya terdiri dari pemerintah kampung (kepala kampung memiliki pengaruh adat yang kuat) dan Bamuskam/Baperkam.

- (2) Kelompok aktivis kampung, merupakan 'orang-orang kebanyakan' yang memiliki jaringan kekeluargaan dengan elit kampung, atau memiliki keahlian yang spesifik yang diperlukan dalam sebuah program (misal: dapat berbahasa Indonesia, guru, PNS, bidan, suster) atau karena kedudukannya dalam organisasi gereja atau pelayanan publik yang ada.
- (3) Kelompok kebanyakan adalah kelompok orang-orang biasa, pada umumnya tidak memiliki kontrol terhadap sumber kekuasaan seperti kepala suku atau kerabat kepala suku, tetapi tetap memiliki akses untuk mengolah ladang, baik di marga terkuat atau di marga-marga biasa (hirarki rendah). Termasuk dalam kalangan ini adalah warga dari suku lain di Papua yang menikah dengan anggota marga di kampung tersebut.
- (4) Kelompok miskin/marjinal adalah kelompok yang tidak mampu mengolah lahan, karena faktor usia maupun fisik (sakit), kelompok janda (semakin sulit jika mereka merupakan pendatang yang menikah dengan marga asli dan memiliki tanggungan yang besar) dan tidak memiliki akses terhadap lahan karena mereka bukan anggota marga yang memiliki lahan.

Di berbagai tempat, terutama di pegunungan atau daerah yang belum bercampur, perbedaan kelas antargolongan masyarakat tidak terlalu tegas, terutama antara kelompok miskin dan kelompok mayoritas. Selain empat kelompok di atas, orang Papua di luar klan atau orang luar dianggap tidak mempunyai hak untuk ikut menentukan. Kekuasaan sangat terpusat di kalangan elit kampung dan kelompok di bawahnya tidak memiliki suara dan biasanya hanya mengikuti kelompok elit. Terdapat dua tipe konteks relasi elit di Papua berdasarkan kekuasaan elit. Konteks pertama adalah kampung yang memiliki satu elit yang kuat. Biasanya hanya terdapat satu klan yang kuat dan terjadi monopoli kekuasaan (contohnya: kepala kampung sekaligus ketua marga terkuat). Kedua, adalah kampung yang memiliki lebih dari satu elit yang kuat, atau terdiri dari dua atau lebih klan yang kuat. Dalam konteks ini biasanya terjadi perimbangan kekuasaan (Sari, dkk., 2011).

Sumber Daya Masyarakat Papua

Sumber daya yang dijadikan modal dalam pembangunan terdiri dari modal sosial, modal budaya, modal manusia, modal finansial, modal pengetahuan dan teknologi, serta sumber daya alam. Modal sosial dan budaya yang dimiliki oleh masyarakat adat sering diabaikan dalam pembangunan yang umumnya berorientasi pada modernisasi karena dianggap sebagai faktor penghambat.

Budaya masih berperan besar dalam kehidupan masyarakat adat. Budaya dapat menjadi salah satu modal dalam pembangunan masyarakat (Throsby, 2001). Pada sisi lain budaya dan karakteristik perilaku merupakan salah satu penyebab tetap terpuruknya komunitas adat. Kelompok masyarakat tersebut jauh lebih rendah tingkat kesejahteraannya bila dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. Kondisi ini ditemui bukan hanya pada negara-negara sedang berkembang tetapi juga di negara-negara maju. Masyarakat adat seperti Suku Indian di Amerika Serikat dan Suku Aborigin di Australia relatif lebih rendah tingkat kesejahteraannya bila dibandingkan dengan komunitas-komunitas lainnya di sana (Hall dan Patrinos, 2010).

Pengabaian modal sosial dan budaya setempat dalam pelaksanaan pembangunan sering menimbulkan konflik antara masyarakat adat dengan pemerintah (negara). Ilmu kebudayaan sendiri tidak mungkin dimiliki. Orang hanya bisa mempelajari kebudayaan sebagai sebuah karakteristik dari suatu sistem sosial, sehingga ilmu tentang sistem-sistem sosial lebih tepat digunakan dalam menganalisis masyarakat (Radcliffe-Brown, 1957, dalam Jenks, 2013, hlm.53). Jika masyarakat dianggap sebagai sekelompok individu yang terorganisasi yang hidup dengan cara tertentu, maka kebudayaan adalah cara hidup itu. Jika masyarakat dianggap sebagai sebuah agregat dari hubungan-hubungan sosial, maka kebudayaan adalah kandungan atau isi dari hubungan-hubungan itu. Masyarakat menekankan pada komponen manusia, sekumpulan manusia dan hubungan-hubungan di antara mereka. Kebudayaan menekankan pada komponen akumulasi sumber daya, baik yang material maupun yang non-material, yang diwarisi, digunakan, diubah, ditambah, dan disebarluaskan oleh masyarakat (R. Firth, 1951, dalam Jenks, 2013, hlm.59). Maka tidak salah jika kemudian kajian kebudayaan masyarakat adat lebih banyak

dilihat dari sistem sosial atau tatanan hidup yang berlaku dalam komunitas mereka.

Modal sosial adalah sumber daya yang memungkinkan manusia untuk bertindak secara kolektif dalam mengakses sumber daya dan memanfaatkannya. Karakteristik bertindak kolektif ini merupakan salah satu tujuan pembangunan sosial pada masyarakat-masyarakat marjinal. Modal sosial terdiri dari kepercayaan, norma, dan jaringan kerja, yang mengatur interaksi sosial; dalam komunitasnya (*bonding social capital*), dengan komunitas lain yang sejajar (*bridging social capital*), dan dengan institusi vertikal (*linking social capital*) (Woolcock & Narayan, 2000). Interaksi sosial dalam suatu masyarakat adat (*bonding social capital*) sangat kuat sehingga dapat saja mengabaikan interaksi sosial antara masyarakat adat dengan komunitas lain (*bridging social capital*) dan/atau institusi vertikal di luar komunitasnya (*linking social capital*).

Demokrasi tradisional (pengaruh adat dominan) yang berlaku di negara-negara etnis Melanesia di Asia Pasifik menyebabkan tidak meratanya pembangunan di sana (negara dianggap gagal). Salah satunya adalah Papua Nugini yang memiliki sekitar 800 etnis dan dikatakan memiliki kualitas *bridging social capital* yang rendah (Reilly, 2004). Reilly (2004) menyatakan bahwa banyaknya jumlah etnis terkait erat dengan kegagalan jalannya pemerintah di negara-negara etnis Melanesia di Asia Pasifik. Modal sosial antarkomunitas (*bridging social capital*) yang tidak begitu baik karena kepentingan kelompok etnisnya akan lebih diutamakan dari pada kelompok lainnya. Pemimpin pemerintahan terpilih di sana lebih mengutamakan kepentingan klan atau sukunya dari pada warga pada umumnya dalam pembangunan. Akibatnya tingkat kepercayaan warga pada negara menjadi rendah dan menyebabkan terjadinya pemberontakan (Reilly, 2004).

Papua terdiri atas berbagai suku bangsa dan budaya (heterogen), yang tersebar pada wilayah yang luas, tidak seperti yang terlihat pada budaya Jawa dan Bali yang fokus dan tidak tersebar (Zolner, 2006: 66; Laksono, 2009a, dalam Suryawan, 2014). Identitas bagi bangsa Papua berarti identitas sekelompok kecil-keluarga, desa kecil atau sekelompok kecil desa-desa. Identitas kelompok kecil atau pribadi itu didefinisikan melalui bahasa tradisi keluarga,

agama, dan cara hidup secara umum yang biasanya berbeda dengan tetangganya. Masing-masing bangsa di tanah Papua mempunyai identitas, yang ditunjukkan dengan menyatakan dirinya manusia, orang-orang yang kemudian ditambahkan dengan nama desa atau sungai asal mereka. Terdapat lebih dari 253 etnik dengan bahasa, struktur sosial, tradisi, sistem kepercayaan/agama, dan kondisi geografis yang berbeda-beda di Papua (Suryawan, 2014). Heterogenitas etnik yang tinggi, kebudayaan dan kompleksitas adat serta gerakan sosial di tanah Papua memiliki sejarah yang kompleks dan penuh dengan ketegangan serta konflik (Suryawan, 2014).

Walaupun keinginan merdeka OAP dan tekanan militer disebut sebagai sumber utama konflik yang terjadi di Papua, tapi itu hanya sebagian dari ketidakamanan topografi yang kompleks di sana. Sebenarnya konflik yang sering terjadi di Papua lebih banyak disebabkan oleh konflik horisontal (kekerasan dalam rumah tangga, antarklan, atau dengan komunitas lain) dari pada konflik vertikal (dengan militer/negara) (Anderson, 2015). Hal itu misalnya terlihat pada adanya dikotomi pesisir dan gunung yang tidak sadar dibangun oleh OAP sendiri yang menurunkan kualitas *bridging social capital*. Orang gunung Papua mengalami diskriminasi dari orang pantai Papua karena dianggap masih berbudaya primitif (Wetipo & Medlama, 2015).

Sementara itu, relasi sosial di dalam masyarakat adat itu sendiri (*bonding social capital*) tergolong sangat kuat, terlebih pada masyarakat adat Papua di daerah pegunungan tengah. OAP pegunungan tengah, seperti Suku Hubula, memandang segala sesuatu di sekitarnya lebih dengan hati atau perasaan daripada pikiran/rasio. Salah satu praktik hidup dengan konsep hati ini dapat dilihat pada upacara adat kematian. Suku Hubula dapat mengorbankan harta benda yang paling berharga seperti *wam* atau babi hingga puluhan ekor sebagai ekspresi kehilangan akibat kematian dan ungkapan rasa sedih. Praktik lainnya adalah adanya tradisi ibu-ibu Suku Hubula untuk memotong salah satu jarinya ketika orang yang dicintai meninggal dunia (Melait, 2017). Namun, ikatan kekerabatan yang kuat ini memiliki dampak negatif terhadap pengembangan modal usaha individu. Karena setiap warga berpartisipasi dan wajib ikut membayar, misalkan denda bila anggotanya melanggar peraturan adat dan bayar adat mas-

kawin bila ada anggotanya menikah (Turua, 2014).

Wilayah yang memiliki heterogenitas etnis tinggi berpotensi konflik (perang antaretnis) dan menyebabkan tidak meratanya pembangunan karena etnosentrisme. Lain halnya di Papua Nugini, selain masyarakat adat terdapat juga masyarakat pendatang di Papua. Pemerintah pusat juga lebih sering direpresentasikan sebagai pihak luar/pendatang di Papua. Komunitas yang disebut terakhir ini menjadi penyeimbang dalam kehidupan berbagai etnis asli di Papua. Negara (institusi polisi dan pemda) seringkali berperan sebagai pihak penengah untuk mendamaikan konflik antarsuku di Papua.

Peradaban Masyarakat Adat

Berdasarkan karakteristiknya, masyarakat adat dapat dibagi atas 4 kelompok, yaitu (AMAN, dalam Kementerian PPN/BAPPENAS, 2013, hlm.8-9):

- (1) Tipe masyarakat adat 'Kanekes' di Banten dan 'Kajang' atau 'To Kajang' (Kajang Dalam) di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan, yang menempatkan diri sebagai 'Pertapa Bumi'. Mereka percaya bahwa mereka adalah kelompok masyarakat 'terpilih' yang bertugas memelihara kelestarian bumi dengan berdoa dan hidup prihatin.
- (2) Tipe masyarakat adat 'Kasepuhan Banten Kidul' dan 'Suku Naga', yang berada di wilayah Jawa Barat. Komunitas ini pada dasarnya cukup ketat dalam memelihara dan menerapkan adat-istiadat, tetapi masih membuka ruang yang cukup luas bagi adanya hubungan-hubungan komersil dengan dunia luar.
- (3) Tipe masyarakat adat yang hidup bergantung dari alam (hutan, sungai, laut, dan lain-lain), mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya alam yang unik, tetapi tidak mengembangkan adat yang ketat untuk perumahan maupun pemilihan jenis tanaman jika dibandingkan dengan komunitas adat Kanekes, To Kajang, maupun Kasepuhan, contoh komunitas ini adalah Masyarakat Adat Dayak dan Penan di Kalimantan, Masyarakat Adat Pakava dan Lindu di Sulawesi Tengah, Masyarakat Adat Dani dan Dafonsoro di Papua.
- (4) Tipe masyarakat adat yang sudah 'tercerabut' dari tatanan pengelolaan sumber daya alam

yang 'asli' sebagai akibat dari penjajahan yang telah berkembang selama ratusan tahun. Termasuk dalam kategori kelompok ini adalah Masyarakat Adat Melayu Deli yang bermukim di wilayah perkebunan tembakau di Sumatera Utara dan masyarakat Betawi di Jabodetabek.

Tiga tipe masyarakat yang disebut pertama merupakan 'masyarakat hukum adat' menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan karena masih memenuhi unsur-unsur: (a) Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechts-gemeenschap*); (b) Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; (c) Ada wilayah hukum adat yang jelas; (d) ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; (e) Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (Kementerian PPN/BAPPENAS, 2013, hlm.9).

Perubahan budaya besar pada kelompok masyarakat ke-4 membuat tidak ada lagi ikatan sosial budaya yang kuat di antara mereka dan tidak ada tuntutan menjalankan ritual adat, membuat lingkungan alam tempat mereka bermukim banyak berubah menjadi lingkungan buatan manusia yang berorientasi ekonomi, meninggalkan pola hidup komunitas subsistensi menjadi individu yang kapitalis. Pergeseran pemahaman *biocentrism* ke arah *anthropocentrism* pada komunitas adat dalam upaya pemanfaatan sumber daya alam semakin jauh pada kelompok masyarakat "tercabut". *Anthropocentrism* memandang bahwa manusia dan kepentingannya dianggap paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan alam merupakan alat bagi kepentingan manusia. Sementara itu, *biocentrism* memandang bahwa alam memiliki nilai pada dirinya sendiri lepas dari kepentingan manusia dan bahwa kehidupan di alam semesta harus dihormati seperti manusia menghormati sistem sosial yang ada dalam kehidupannya (Susilo, 2012). Saat ini, istilah bagi masyarakat yang menganut *biocentrism* dapat juga disebut sebagai masyarakat yang berwawasan ekologi.

Teori ketertinggalan budaya menyebutkan bahwa ketertinggalan yang paling jelas dalam kehidupan manusia adalah ketertinggalan alam pikiran dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, umumnya terjadi pada masyarakat-masyarakat tradisional yang sedang berkembang (Lauer, 2003). Beberapa ahli menyatakan ada

perbedaan karakteristik antara masyarakat tradisional dengan masyarakat modern dan terdapat tahapan-tahapan perubahan struktur ekonomi yang harus dilalui kelompok masyarakat tradisional menuju masyarakat modern (Parson, 1951, Rostow, 1960, dalam Amien, 2005). Ahli lainnya menyatakan bahwa ciri masyarakat tradisional juga terdapat pada masyarakat modern di beberapa negara maju dan untuk menuju masyarakat modern tidak selalu harus melalui semua tahapan perubahan struktur ekonomi (Frank, 1969, Gerschenkron, 1962, dalam Amien, 2005).

Berdasarkan perkembangan tersebut, terdapat ahli lain yang menyatakan modernisasi adalah rasionalisasi perilaku sosial dan organisasi sosial. Modernisasi merupakan pertumbuhan dalam kemampuan menerapkan pengetahuan yang teruji kepada semua cabang produksi dan modernitas sebagai kerangka sosial budaya dan psikologis yang mendukung penerapan sains dalam proses produksi (Moore, 1977, Hettne, 1990, dalam Amien, 2005). Berdasarkan perkembangan dari pendapat ahli yang telah disebutkan di atas, maka suatu masyarakat yang menjalankan ritual adatnya dalam kehidupan keseharian dapat masuk kategori masyarakat modern selama ada penjelasan sains atas setiap tindakan tersebut (rasionalisasi).

Pelaksanaan otsus di beberapa daerah melalui program-program pembangunan pemberdayaan masyarakat kampung belum memberdayakan OAP, yang terlihat dari:

- (1) Rendahnya tingkat partisipasi dalam setiap program pembangunan kampung akibat masih dominannya peran kelompok elit kampung (Sari, dkk, 2011)
- (2) Masih banyaknya OAP yang tidak mengenal berbagai program pembangunan yang didanai otsus (BAPPEDA Kab. Lanny Jaya, 2017).

Pada masa ini, ada pertumbuhan dan penguatan fungsi kelompok elit kampung, membuat mereka menjadi kelompok yang mendominasi setiap aktivitas pembangunan di kampung atau wilayah adat. Kelompok ini menjadi kelompok menengah yang tumbuh dalam masyarakat adat Papua yang menganut sistem feodalisme akibat pengaruh kolonialisme pada masa lalu. Pada bagian lain masyarakat dunia, tumbuhnya kekuasaan kelompok menengah membawa perubahan menuju demokrasi, tetapi

di Papua, kelompok elit ini membawa perubahan menuju feodalisme. Mereka menjadi raja-raja kecil di daerahnya, menjadi penguasa atas sumber daya alam di wilayahnya. Munculnya kelompok ini membuat penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam masyarakat adat menjadi tidak merata. Dampaknya adalah munculnya kelompok marjinal baru di dalam kampung, yaitu OAP tetapi bukan berasal dari daerah setempat (Sari, dkk., 2011).

Minimnya wawasan para elit tentang masa depan sering dimanfaatkan dan dimanipulasi oleh pemilik modal atau pengusaha untuk memperoleh sejumlah besar lahan adat di Papua (Suryawan, 2017). Setelah tanah adat ini beralih kepemilikan, maka menyebabkan semakin miskinnya OAP karena terputusnya akses pada sumber-sumber daya alam mereka. Sementara itu, kelompok elit menikmati keuntungan ekonomi yang diperoleh dari jual beli tanah adat dalam jangka waktu yang tidak lama, karena pada akhirnya mereka juga akan termarjinalkan.

Program pembangunan masa otsus justru melemahkan kapasitas OAP sendiri, seperti tidak mau bekerja demi kepentingan kampungnya jika tidak dibayar dan kaum pria juga mulai meninggalkan pekerjaan sebagai petani karena mengharapkan dana kampung (Semboari, 2012; Go M, 2014). Terdapat ketidakmampuan mengikuti perkembangan peradaban yang demikian cepat melalui berbagai program pembangunan. Hal ini menimbulkan tanggapan negatif dari OAP seperti perasaan kurang puas, sikap pasif, apatis, dan regresif terhadap keyakinan suatu saat akan tiba masa yang lebih baik. Lebih lanjut, muncul sikap agresif dan destruktif (Koentjaraningrat, dkk., 1994). Diawali perasaan tidak puas yang mereka tujukan pada Belanda sebagai penyebab terjadinya perubahan-perubahan yang cepat dan membingungkan mereka (Kouwenhon, 1956, dalam Koentjaraningrat dkk, 1994) dan ketidakpuasan itu beralih ditujukan pada pemerintah Indonesia dan komunitas non-Papua (Koentjaraningrat, dkk., 1994; Djojosoekarto, dkk., 2012).

Peradaban OAP jauh tertinggal bila dibandingkan dengan masyarakat adat lain di Indonesia. Interaksi dengan dunia luar baru terjadi sekitar tahun 1933 pada masyarakat pedalaman Papua (Diamond, 2015). Masa penjajahan Belanda relatif pendek bila dibandingkan

dengan masa kolonialisme pada masyarakat adat lain di Indonesia, sehingga tanpa banyak menerima pengaruh budaya luar, ketertinggalan peradaban di Papua khususnya di daerah pedalaman relatif masih berlangsung.

Ketika pertama kali ke Papua, Belanda melihat OAP sebagai bangsa kafir dan primitif yang harus segera 'diadabkan' melalui ajaran agama dan memusnahkan semua benda-benda pemujaan maupun ajaran-ajaran yang merupakan bagian dari budaya setempat. Salah satu contohnya adalah larangan berperang oleh pihak gereja maupun pemerintah, padahal berperang merupakan tradisi OAP dalam menyelesaikan konflik kepentingan. Selain rasa tidak puas dan kemarahan, pandangan dan sikap yang demikian keras ini menimbulkan rasa rendah diri pada OAP karena adanya pandangan budaya mereka pada saat itu merupakan suatu kesalahan atau kebodohan besar. Seharusnya basis ontologis dari struktur sosial OAP menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam menentukan kebijakan-kebijakan budaya agar terjadi perubahan sosial yang lebih bermartabat (Sugandi, 2013).

Kegiatan pembangunan atau modernisasi Papua oleh pemerintah Indonesia dimulai sejak tahun 1969. Sikap pemerintah Indonesia sama dengan pemerintah Belanda yang melihat penduduk asli Papua sebagai bangsa primitif yang perlu dimodernisasi. Ada perubahan peradaban yang dipaksakan pada OAP (Koentjaraningrat, dkk., 1994; Djojosoekarto, dkk., 2012; Suryawan (ed.), 2011).

Muncul dua realita baru pada diri OAP setelah proses negaraisasi yang masif oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 1969, yaitu (Djojosoekarto, dkk., 2012, hlm.154):

- (1) Realitas *inferiority complex*, yaitu memiliki perasaan rendah diri ketika harus berinteraksi baik dalam lingkungan ekonomi politik maupun dalam lingkungan sosio-kultural. Pada saat berhadapan dengan negara atau komunitas non-Papua, konstruksi citra diri OAP selalu menempatkan posisi sebagai korban.
- (2) Realitas transaksional adalah perwatakan transaksional. Ini merupakan sebuah pilihan strategi untuk bertahan di tengah pergumulan dilema yang tak berkesudahan. Praktik transaksional OAP dibangun di atas logika *inferiority complex*. Konsekuensi dari citra diri sebagai korban, maka OAP mempunyai

hak moral untuk memperoleh nilai lebih dari setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh negara dan komunitas non-Papua di dalam kehidupannya.

Salah satu ekspresi logika transaksional dari OAP tercermin dari sikap untuk mengambil keuntungan secara cepat dari setiap kebijakan publik, seperti pada kebijakan otsus, pengelolaan dana otsus, maupun kebijakan afirmatif lainnya. Para penerima manfaat yang bersikap transaksionalis hanya akan melihat program pembangunan sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan/dipertukarkan dengan barang atau kesempatan lain yang belum tentu mempunyai kemanfaatan yang baik/jangka panjang (Djojosoekarto, dkk., 2012: 154).

Pengabaian nilai-nilai antropologis seperti yang telah diamati selama ini justru cenderung kontraproduktif dan mengakibatkan daya rusak yang bersifat masif (Djojosoekarto, dkk., 2012: 162). OAP masih menaruh kecurigaan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Sikap antipati, apatis, dan sinis terhadap program Pemerintah Papua berpotensi mengganggu jalannya pembangunan itu sendiri (Enembe, 2016).

Proses pembangunan yang masif oleh pemerintah pusat lewat berbagai program pembangunan ternyata tidak memperhatikan modal sosial dan budaya OAP dan malah menimbulkan dampak negatif, yaitu munculnya kelabilan budaya dalam transformasinya (Djojosoekarto, dkk, 2012; Modouw, 2013). Hal itu salah satunya terlihat dari fakta bahwa OAP jadi menginginkan segala sesuatunya serba instan (Modouw, 2013). Terdapat lompatan budaya cukup jauh yang harus dijalani OAP, dari peradaban masa prasejarah tiba-tiba dihadapkan dengan peradaban modern. OAP mengalami proses perkembangan budaya dan peradaban yang begitu cepat hanya dalam waktu yang relatif singkat dibandingkan banyak bangsa dan suku bangsa lain di dunia (Modouw, 2013: 37). Nilai, norma, etika, agama, dan estetika yang berasal dari kearifan budayanya sendiri tidak cukup lama mengendap dan membentuk watak dan kebudayaan baru (Modouw, 2013: 50-51).

Para pimpinan daerah yang juga merupakan OAP juga ingin segera menikmati segala fasilitas peradaban modern dalam waktu singkat. Sehingga lebih sering berada di daerah yang lebih maju atau kota-kota besar daripada tinggal di daerah pemerintahannya sendiri. Lebih

lanjut, para pemimpin OAP juga lebih memilih memperkerjakan pendatang karena dianggap bisa bekerja daripada berupaya memberdayakan OAP setempat agar dilatih untuk mampu bekerja (Dumupa dalam Bobi, 2014; Pigai, 2011). Agar kelabilan budaya ini tidak terjadi terus-menerus perlu upaya rekayasa sosial lewat pendidikan (Modouw, 2015).

Pada saat Papua di bawah Pemerintahan Belanda, para misionaris atau pihak gereja membuka sekolah-sekolah untuk 'mengadabkan' masyarakat asli Papua yang dianggap masih primitif. Sekolah-sekolah peradaban ini mengajarkan hal-hal sederhana yang terkait dengan aktivitas kehidupan mereka sehari-hari. Modouw (2015) menyarankan penerapan pendidikan di Papua dengan model pendekatan wilayah, disesuaikan dengan empat karakteristik peradaban masing-masing komunitas OAP, yaitu: (1) Masyarakat kota (wilayah perkotaan); (2) Masyarakat kampung di wilayah pinggiran; (3) Masyarakat kampung di wilayah terpencil; (4) Masyarakat peramu di wilayah terisolasi;

Aliran pengetahuan modern yang cenderung berorientasi pada kesejahteraan manusia (*anthropocentrism*) akan selalu bertolak belakang dengan aliran pengetahuan tradisional yang cenderung berorientasi pada penghormatan terhadap alam (*biocentrism/ecocentrism*). Dua kutub yang bertolak belakang ini akan sulit untuk dipertemukan. Umumnya, di negara-negara sedang berkembang, pertemuan dua alam pikiran tradisional dan alam pikiran kapitalistis (modern) menyebabkan konflik berkepanjangan. Oleh karena itu, selain pembangunan sumber daya alam dan pembangunan sumber daya manusia, penting juga untuk melakukan pembangunan sumber daya kebudayaan pada suatu derajat tertentu sehingga kesenjangan antara sistem ekonomi dan sistem sosial-budaya dapat diminimalisasi (Sastradipoera, 2006).

Kondisi Umum Kabupaten Lanny Jaya

Kabupaten Lanny Jaya terbentuk pada tahun 2008 yang merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya. Beribukota di Tiom, sejak ada pemekaran distrik dan kampung pada tahun 2015, Lanny Jaya terdiri dari 39 distrik, 1 kelurahan, dan 354 kampung (Lanny Jaya Dalam Angka 2017). Distrik Tiom sendiri terdiri dari 1 kelurahan (Bokon) dan 10 kampung, yaitu Kampung Oyi, Gurika, Olume, Dura, Langgalo, Kuapur, Wandinalome, Yilondum, Palunggame,

dan Ginime. Tiom dapat ditempuh lewat jalur udara dan darat dari Wamena. Letak geografi Kabupaten Lanny Jaya: 137°51'4,274"BT – 138°44' 50,365"BT dan 3°43'56,793" LS- 4°14'21,56"LS. Batas wilayah Kabupaten Lanny Jaya adalah sebagai berikut.

- Sebelah Utara : Kabupaten Tolikara
- Sebelah Selatan : Kabupaten Puncak
- Sebelah Barat : Kabupaten Nduga
- Sebelah Timur : Kabupaten Jayawijaya

Wilayah Kabupaten Lanny Jaya memiliki topografi dataran tinggi; seluruh wilayahnya berbukit-bukit, terjal, dan sulit untuk mendapatkan daerah permukiman yang datar. Rata-rata suhu mencapai 20.125°C dengan suhu terendah 10,5°C dan maksimum 29,4°C. Kelembaban udara rata-rata 86,58%. Kerap terjadi hujan di Lanny Jaya.

Pada tahun 2016, Kabupaten Lanny Jaya memiliki 134 sekolah TKK/PAUD, 68 SD, 24 SMP, dan 7 SMA serta 1 SMK. Terdapat 1 Rumah Sakit pemerintah, 10 unit Puskesmas, 24 Puskesmas Pembantu, dan 7 Balai Pengobatan. Kabupaten Lanny Jaya memiliki 11 unit landasan pesawat dan 29 ruas jalan didominasi jalan kerikil dengan total panjang 235,77 Km. Mayoritas penduduk Kabupaten Lanny Jaya memeluk agama Kristen Protestan. Ada 270 unit gereja Kristen Protestan dan 2 unit gereja Katolik.

Tanaman yang paling banyak ditanam di Kabupaten Lanny Jaya adalah tanaman umbi-umbian seperti ubi jalar, ubi kayu dan keladi yang merupakan makanan pokok penduduk asli Kabupaten Lanny Jaya. Iklim di Kabupaten Lanny Jaya cocok untuk menanam sayuran. Ada juga produksi jagung, kedelai, kacang tanah, kacang merah, bawang merah, bawang putih, bawang daun, bayam, buncis, cabai rawit, kacang panjang, kangkung, ketimun, kubis, labu siam, petsai/sawi, terong, tomat, gembili, bunga kol, kentang, wortel, cabe besar, seledri, alpukat, jeruk manis, jambu biji, pepaya, pisang, nanas, markisa, dan terong belanda. Tanaman perkebunan yang ada di Lanny Jaya adalah tebu, kopi dan buah merah (tanaman asli Papua). Pada tahun 2016 produksi kopi sebesar 606 ton (0,6 ton/Ha) dan buah merah sebesar 700 ton (4 ton/Ha). Babi merupakan ternak yang paling banyak dipelihara di Kabupaten Lanny Jaya. Tahun 2016 terdapat 32.823 ekor babi, 8.880 ekor kelinci, 252 ekor kambing dan 68 ekor sapi. Ayam buras sebanyak 20.882 ekor. Kolam

budidaya ikan seluas 112,76 Ha. Jenis ikan yang dibudidayakan antara lain: ikan mas, nila, mujaer, lele, dan udang (Lanny Jaya Dalam Angka 2017).

Pada tahun 2016, mayoritas penduduk Lanny Jaya menggunakan pelita sebagai penerangan walau listrik PLN sudah masuk ke 15 wilayah distrik. Ada 17 pembangkit tenaga listrik di Lanny Jaya yang terdiri dari 2 unit PLTD (Tiom), 3 unit PLTMH (Poga, Makki, dan Tiom Olo), dan 12 unit PLTS/Solar System (Tiomneri, Malagaineri, Balingga, Pirime, Gamelia, Tiom Olo, Yugungwi, Mokoni, Wereka, Gollo, Awina, dan Wano Barat).

Jumlah usaha perdagangan secara keseluruhan di Lanny Jaya adalah sebanyak 482 usaha, yang didominasi oleh usaha perdagangan kelontong. Usaha dagang kelontong terbanyak di Tiom (170 unit), 20 unit di Makki, dan 15 unit di Poga. Usaha rumah makan paling banyak terdapat di Tiom (15 unit). Harga-harga sembako di Lanny Jaya lebih mahal jika dibandingkan dengan harga di Kabupaten Jayawijaya karena harus didatangkan terlebih dahulu melalui Kota Wamena lewat angkutan darat (carteran) atau pesawat terbang. Selama tahun 2016, harga beras Dolog berkisar antara Rp.15.000,- hingga Rp.16.000,- /kg, minyak goreng curah berkisar antara Rp.29.000,- hingga Rp.33.000,-/liter, gula pasir berkisar antara Rp.28.000,- hingga Rp.30.000,-/kg, garam hancur Rp.8.500- Rp.10.000,-/bungkus, minyak tanah Rp.23.500,- hingga Rp.25.000,-/liter dan sabun cuci B29 Rp.14.000,- hingga Rp.15.000,-/bungkus. Berdasarkan hasil susenas, sebagian besar pendapatan yang diperoleh penduduk digunakan untuk konsumsi makanan (76,14%) pada tahun 2016 (Lanny Jaya Dalam Angka 2017):

Tabel 2

PerSENTASE Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan di Kabupaten Lanny Jaya

Kelompok Barang	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Makanan	76,10	79,99	72,30	73,33	71,79	76,14
Bukan Makanan	23,90	20,01	27,70	26,67	28,21	23,86
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Lanny Jaya Dalam Angka 2017

Berdasarkan data BKKBN Kabupaten Lanny Jaya disebutkan sebagian besar keluarga pada tahun 2015 merupakan keluarga prasejahtera, yaitu sebanyak 84.667 keluarga (53,17%). Kurang dari 1% keluarga di Kabupaten Lanny Jaya termasuk dalam tahapan keluarga sejahtera III, yaitu sebanyak 847

keluarga, dalam tahapan keluarga sejahtera II sebanyak 11.408 keluarga (7,16%), dan dalam tahapan keluarga sejahtera I sebanyak 62.322 keluarga (39,14%). Garis kemiskinan pada tahun 2016 yaitu Rp 405.347/kapita/bulan. Persentase penduduk miskin, yaitu 41,68% pada tahun 2016 sedikit turun dibandingkan tahun 2015.

Tabel 3

Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Lanny Jaya

Tahun	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk	Persentase
	(Rp/Kapita/Bulan)	Miskin (jiwa)	Penduduk Miskin
2011	291.230	69.200	44,96
2012	313.959	61.200	42,33
2013	338.536	71.600	43,79
2014	351.597	67.200	39,26
2015	383.166	72.130	41,97
2016	405.347	72.130	41,68

Sumber: Lanny Jaya Dalam Angka 2017

Pada tahun 2008, Kabupaten Jayawijaya dimekarkan menjadi 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga, serta Kabupaten Jayawijaya sebagai kabupaten induk. Bila dibandingkan dengan kabupaten lainnya, kecuali Jayawijaya, pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Lanny Jaya relatif lebih baik.

Tabel 4

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten-Kabupaten di Pegunungan Tengah (%)

No.	Kabupaten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jayawijaya	41,01	39,05	41,81	39,60	39,48	39,66
2	Mamberamo Tengah	45,57	42,84	39,59	35,47	35,54	38,36
3	Yalimo	41,81	34,49	40,33	35,65	35,88	35,80
4	Lanny Jaya	44,96	42,33	43,79	39,24	41,97	41,68
5	Nduga	40,68	38,14	39,69	33,38	-	38,47

Sumber: Lanny Jaya Dalam Angka 2017

Tahun 2014, sebanyak 143 kampung/kelurahan menerima Alokasi Inpres Bantuan Pembangunan Kampung, dana Respek (Rencana Strategi Pembangunan Kampung), Alokasi PNPM Mandiri, Prospek, MP3KI, Ekonomi produktif, dan Dana Operasional Kampung yang dikucurkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Masing-masing dengan nominal yang sama (Kabupaten Lanny Jaya Dalam Angka 2015). Pada tahun 2016, total bantuan dana inpres kampung yang diberikan oleh Pemda Kabupaten Lanny Jaya kepada desa/kampung adalah sebesar 281 milyar rupiah atau sebesar

794 juta rupiah untuk satu kampung (Lanny Jaya Dalam Angka 2017).

Tabel 5

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten-Kabupaten di Pegunungan Tengah

No.	Kabupaten	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jayawijaya	50,79	51,66	52,27	52,94	53,37	54,18	54,96
2	Mamberamo Tengah	19,62	21,12	23,07	24,42	25,38	25,47	26,56
3	Yalimo	41,49	41,90	42,53	43,05	43,28	44,32	45,16
4	Lanny Jaya	39,37	40,17	41,39	42,43	43,19	44,18	44,15
5	Nduga	38,47	40,45	41,84	43,33	44,21	43,55	44,95

Sumber: Lanny Jaya Dalam Angka 2017

Pembangunan di wilayah Kabupaten Lanny Jaya sepenuhnya bertumpu pada pemerintahan kabupaten. Arah pembangunan sesuai RPJMD kabupaten yang mengacu pada RPJM Provinsi dan Nasional. Bupati beserta jajarannya merupakan pengambil keputusan sentral dalam penggunaan dana-dana pembangunan. Setiap kampung akan memperoleh dana pembangunan dengan besaran yang diatur seadil mungkin oleh pemkab setempat. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung bertindak sebagai penerima proposal dan pengawasan pelaksanaan isi proposal sesuai dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Raker (rapat kerja) kepala-kepala kampung biasa dilaksanakan di bawah arahan bupati pada awal tahun sebelum mereka menyusun proposal pembangunan masing-masing kampungnya.

Bila bupati dan pejabat di bawahnya tidak berada di tempat, aktivitas pemerintah di kantor bupati relatif sepi. Tokoh kepemimpinan pemerintahan di wilayah pegunungan mengadopsi pola pemimpin 'pria berwibawa' (*bigman*) menurut adat setempat. Segala macam aktivitas yang direncanakan, diputuskan, dan akan diimplementasikan sangat tergantung pada keberadaan bupati. Setiap program pembangunan yang berpihak pada OAP di Kabupaten Lanny Jaya merupakan keputusan bupati, walupun masukannya juga datang dari masyarakat kampung.

Seperti program 'Lanny Jaya Sehat' dan 'Lanny Jaya Cerdas', adalah program yang dicanangkan bupati setelah melihat kondisi dan permasalahan di daerahnya. Semua program ini sifatnya adalah 'mengobati' bukan untuk 'pencegahan'. Seperti masih rendahnya pendidikan OAP di Lanny Jaya diatasi dengan membangun sekolah, asrama, mendatangkan tenaga guru kontrak, dan tambahan biaya hidup bagi yang kuliah di luar Lanny Jaya. Mengapa

pendidikan warganya masih rendah kurang dievaluasi secara mendalam sehingga belum menyentuh pokok permasalahannya.

Modouw (2013) merekomendasikan adanya kurikulum pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan penduduknya yang akan terkait dengan topografi wilayah tempat tinggal dan budaya peradaban mereka. Namun, semua program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah daerah umumnya lebih sesuai bila diterapkan bagi OAP yang tinggal di daerah perkotaan. Pembangunan dengan arah modernisasi seperti ini lebih mudah diterima dan dijalankan oleh OAP yang bermukim di kota.

Atas instruksi dari bupati, setiap kepala keluarga OAP Kabupaten Lanny Jaya (dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga) memperoleh uang satu juta rupiah per bulan. Sebagian dana pembangunan di Kabupaten Lanny Jaya bersumber dari dana otsus tetapi masih banyak warga yang belum mengetahui hal ini. Tingkat partisipasi OAP Kabupaten Lanny Jaya dalam pembangunan berada pada level partisipasi pasif (BAPPEDA Kab.Lanny Jaya, 2017). Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya bersikap protektif terhadap warganya seperti misalkan miras dilarang diperjualbelikan di sana. Seorang pendatang yang kedatangan menjual miras selain diproses secara hukum juga diberi hukuman fisik agar menjadi peringatan bagi warga lain di sana.

Kondisi Umum Distrik Tiom

Sejak Kabupaten Lanny Jaya berdiri pada tahun 2008 dan Tiom ditetapkan sebagai ibukotanya, sudah banyak pembangunan fisik dilakukan di sana. Tiom yang dulunya perkampungan tumbuh cepat menjadi daerah yang mempunyai karakteristik kota. Walaupun demikian, masih banyak ditemui rumah-rumah tradisional (*honai*) di sana. Infrastruktur fisik yang dibangun terutama adalah jalan, gedung-gedung perkantoran pemerintah, serta gedung-gedung fasilitas pelayanan publik. Akan tetapi jaringan drainase dan fasilitas penampungan sampah belum ada di kawasan pusat perekonomian atau pasar Tiom sehingga kondisi di sana terlihat kumuh.

Kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi warga asli pada umumnya masih sama seperti dengan kehidupan di pedesaan. Mayoritas warga adalah petani dan peternak dan masih melakukan mobilitas dengan berjalan tanpa alas kaki. Tingkat produktivitas kerja petani orang asli

Papua di Tiom menjadi rendah sejak daerah ini berkembang menjadi daerah perkotaan. Warga cenderung pasif dalam menyikapi perubahan cepat yang terjadi di sana. Waktu keseharian mereka, kaum pria maupun wanita, lebih banyak dihabiskan dengan berbincang-bincang antar-keluarga karena hampir semua warga Tiom masih berkerabat. Kaum wanita masih menyisihkan sedikit waktunya untuk berkebun. Mereka menyandarkan hidupnya pada bantuan dari pemerintah (dana kampung) sebesar satu juta rupiah per keluarga per bulan, yang sebenarnya sangat tidak cukup mengingat mahalannya berbagai harga kebutuhan pokok di Tiom. Saat uang habis, warga akan berhutang di kios-kios kecil dengan janji akan dibayar jika dana kampung cair, atau menahan lapar jika sudah tidak bisa berhutang lagi. Anak atau anggota keluarga lain kelaparan dan berkeliaran mencari makanan ke rumah-rumah warga lainnya yang notabene adalah keluarga mereka. Hal tersebut adalah hal yang biasa, sehingga pemerintah turun tangan dengan memberi imbauan agar orang tua memperhatikan makanan anak-anak mereka. Karena jika setiap warga saling berharap keluarga lain akan memberi makan anak-anak mereka maka yang ada adalah anak-anak lapar yang berkeliaran.

Ubi jalar yang dibakar merupakan makanan pokok mereka. Karena suhu yang dingin, biasanya mereka makan disertai dengan minum teh atau kopi panas. Menurut cerita salah seorang guru SMA di Tiom, para siswa biasa datang ke sekolah tanpa sarapan pagi, jika sekolah usai, mereka akan pulang dan membantu keluarganya berkebun dan baru makan setelah orang tua pulang dari kebun dan membawa hasil panen ubi jalar untuk dimasak. Anak-anak menahan lapar menjadi hal biasa di Tiom, demikian juga dengan orang dewasanya, dan belum ada upaya mereka sendiri untuk mencari jalan keluar atas permasalahan ini.

Lompatan peradaban yang harus dihadapi oleh OAP di daerah pegunungan cukup jauh. Dalam prosesnya, masih banyak hal yang harus mereka pelajari untuk menemukan sendiri bentuk adaptasi terhadap peradaban modern yang sesuai bagi mereka. Untuk hal yang bersifat mendasar saja seperti kewajiban memberi makan anak masih harus diingatkan karena sesungguhnya kondisi sudah berubah saat ini sehingga tidak bisa lagi mengandalkan keluarga lain untuk memberi makan anak-anak mereka.

Gambar 2
Poster Imbauan Pemerintah agar Orang Asli Papua
Memperhatikan Kebutuhan Makanan Anak-Anak Mereka



Sumber: hasil survei tahun 2018

Contoh yang lain menunjukkan bahwa OAP perlu waktu lebih lama untuk beradaptasi dalam lompatan peradaban karena banyak hal-hal mendasar yang perlu mereka pelajari terlebih dahulu. Pimpinan sebuah LSM di Tiom yang merupakan pendatang menceritakan bagaimana ia melatih dua orang pegawainya yang merupakan OAP yang kuliah untuk membiasakan diri datang ke kantor tepat waktu pada pagi hari dan membersihkan ruang dan lingkungannya sebelum mulai menggunakan kantor untuk bekerja. Diperlukan waktu sekitar enam bulan untuk melatih mereka hingga mempunyai sikap bertanggung jawab seperti datang tepat waktu dan memegang sapu secara benar ketika ada atau tidak ada pimpinan kantor mereka.

Kondisi Ekonomi Masyarakat Kampung di Tiom

Usaha warung atau kios di permukiman warga umumnya dimiliki oleh warga pendatang. Kios menempati bangunan yang disewa dari warga setempat. Seorang ibu pemilik kios (warga pendatang) yang menikah dengan OAP membangun kios di depan rumah suaminya. Pemilik kios ini mengeluhkan sulitnya mencari nafkah lewat usaha kios. Karena warga setempat, yang juga merupakan kerabat suaminya, sering berhutang jika berbelanja di kiosnya. Sehingga sulit mengumpulkan modal dagang terlebih menghitung untung dari usaha yang dijalani.

Namun, jika tidak diberi hutang, warga akan berbelanja di kios lain saat memiliki uang (biasanya saat dana kampung dicairkan). Keluarga besar suami juga sering berkunjung ke rumah yang dianggap seperti rumah sendiri dan memanfaatkan makanan atau minuman yang tersedia di sana. Ini juga dikeluhkan oleh ibu pemilik kios. Beberapa kerabat suami ikut menumpang membangun kandang babi di pekarangan rumah mereka dan memeliharanya di situ. Berbeda dengan warga di distrik lainnya yang membiarkan babinya berkeliaran, maka semua warga Tiom yang beternak babi wajib mengkandangkannya.

Sang ibu juga mengeluhkan adat budaya yang berlaku di daerah suaminya yang dianggap merugikan dirinya. Ibu ini yang memelihara dan merawat babi-babi yang mereka miliki, tapi harus iklas menyerahkan babi peliharaannya jika ada ketentuan adat yang mengharuskan suaminya ikut menyumbang. Salah satu kasus yang sulit diterimanya tetapi harus dijalankan adalah memberikan babinya sebagai mas kawin untuk keluarga isteri pertama dari suaminya (saat itu mereka tidak menikah secara resmi sehingga pihak keluarga pria belum memberikan mas kawin). Walaupun kemudian sang isteri pertama memilih pergi meninggalkan suami dan kini sudah meninggal dunia. Sedangkan keluarga isteri yang kedua ini, tidak berhak menuntut babi sebagai mas kawin, karena merupakan warga pendatang (tidak diakui dalam adat).

Masyarakat kampung belum bisa terlibat dalam aktivitas ekonomi modern seperti usaha dagang di kios. Mereka hanya bisa berdagang hasil kebun di pasar yang hanya memerlukan modal tenaga untuk berkebun dan menjual hasil panen. Mereka belum bisa mengumpulkan modal dan memutarinya untuk mencapai keuntungan yang lebih banyak. Salah satu kebiasaan yang mempengaruhinya karena modal usaha ini habis oleh kebiasaan berhutang dan menganggap barang yang dikonsumsi milik satu keluarga adalah juga milik keluarga besar. Sehingga muncul persepsi tidak perlu membayar barang

yang dikonsumsi atau berhutang dulu. Prinsip mereka, *“ada sama dimakan, tidak ada sama-sama tahan lapar”*. Keluarga yang dianggap mampu biasanya akan sering dikunjungi oleh keluarga besarnya dan keluarga yang tidak mau berbagi akan dijauhi oleh keluarganya. Namun, karena lapar menjadi peristiwa yang sering terjadi di sana maka jika terdapat pembagian makanan dengan jumlahnya kecil dapat menimbulkan perkelahian. Jika seseorang memperoleh makanan dalam jumlah yang hanya cukup untuk dirinya bisa saja ia akan pergi menyendiri untuk menikmatinya.

Gambar 3

Aktivitas Mama-Mama Tiom Menuju Pasar



Sumber: hasil survei tahun 2018

Aktivitas ekonomi modern yang mulai dikenal masyarakat kampung adalah usaha menyewakan lahan atau rumah. Ada ketentuan di Kabupaten Lanny Jaya bahwa tanah di sana merupakan tanah milik komunitas adat dan tidak boleh diperjualbelikan. Kawasan pasar tradisional di Tiom, walaupun umumnya dibangun dan dikelola oleh warga pendatang, tetapi berada di atas tanah milik warga setempat. Hal ini menjadikan warga pendatang harus membayar sewa setiap bulannya. Bangunan di pasar merupakan bangunan semi permanen yang terbuat dari kayu dan triplek serta beratap seng. Warga pendatang berjualan sekaligus tinggal pada petak-petak bangunan tersebut. Rata-rata pedagang membayar sekitar Rp.1.000.000,-/bulan kepada pemilik lahan dan Rp.300.000,-/bulan sebagai retribusi pada pemerintah. OAP atau masyarakat kampung yang berdagang di

kawasan pasar umumnya adalah mama-mama Tiom yang menggelar dagangannya di atas tanah beralas tikar. Barang yang dijual kebanyakan adalah hasil kebun mereka berupa umbi-umbian dan sayuran. Pemasaran hasil-hasil pertanian ini kurang memungkinkan jika dijual keluar Tiom, karena masih mahal biaya transportasi menuju wilayah pemasaran yang potensial seperti Kota Wamena. Sarana transportasi umum yang tersedia adalah angkutan mobil bak terbuka dengan ongkos sebesar Rp.200.000,-/orang duduk di dalam mobil dan Rp.100.000,-/orang duduk di bak terbuka dengan waktu tempuh sekitar 2-3 jam melalui kondisi beberapa ruas jalan yang masih buruk.

Harga berbagai kebutuhan pokok di Tiom relatif lebih mahal karena harus didatangkan dari Wamena yang sebelumnya didatangkan dari luar Papua melalui Kota

Jayapura. Oleh karena itu, dapat dipahami mengapa masyarakat kampung lebih sering berhutang di kios-kios kecil untuk memperoleh produk-produk pabrik. Hal tersebut dikarenakan uang sebesar satu juta rupiah per bulan yang diterima setiap keluarga OAP sangat tidak mencukupi. Di sisi lain, masyarakat kampung tidak produktif bekerja untuk memperoleh penghasilan lain.

Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Kampung di Tiom

Pemerintah kabupaten membangun permukiman rumah kayu bagi masyarakat kampung untuk menggantikan honai. Karena rumah tradisional masyarakat pegunungan yang tidak memiliki ventilasi untuk udara dan cahaya dianggap kurang higienis. Pada kenyataannya beberapa warga meninggalkan rumah kayu dan kembali menghuni honainya. Suhu dingin

diperkirakan menjadi penyebabnya yang berbeda dengan honai yang biasanya terdapat tungku perapian untuk memasak di tengahnya. Tungku ini berfungsi sekaligus sebagai pemanas ruangan dalam honai. Lebih lanjut, masyarakat kampung (OAP) masih belum mampu membeli pakaian dan/atau selimut.

Beberapa anggota masyarakat kampung yang biasanya tokoh masyarakat yang memiliki lahan luas membangun beberapa unit rumah kayu. Rumah tersebut kemudian disewakan kepada para pendatang. Ada seorang warga kampung, menggunakan jasa seorang warga pendatang untuk mengelola dan menyewakan rumah-rumah sewa miliknya. Rata-rata rumah petak kecil untuk dua orang di Tiom disewakan sekitar Rp.1.000.000,-/bulan, sedangkan rumah lebih besar untuk keluarga disewakan sekitar Rp.2.000.000,-/bulan.

Gambar 4.

Permukiman Rumah Kayu untuk OAP di Kampung Wandinalome, Tiom



Sumber: hasil survei tahun 2018

Babi atau *wam* dianggap sebagai benda berharga bagi masyarakat pegunungan Papua. Babi ini dipelihara bukan untuk dikonsumsi sendiri atau untuk memenuhi kebutuhan hidup keseharian mereka, tetapi untuk memenuhi kebutuhan adat istiadat. Rata-rata tiap keluarga memelihara sekitar 2-4 ekor babi. Babi dikonsumsi bersama lewat acara *barapen* atau bakar batu sebagai tanda telah terselesaikannya secara damai suatu sengketa antarwarga/suku atau untuk acara adat lainnya.

Jumlah babi yang diputuskan dalam perundingan jika terjadi konflik sosial seringkali sangat besar dan tidak masuk di akal. Hal

tersebut tentu sangat memberatkan keluarga besar bagi pihak yang disalahkan. Contoh kasus yang terjadi pada bulan Februari 2018 yaitu peristiwa suami bunuh isteri. Pada kasus tersebut keluarga besar pihak isteri menuntut babi dalam jumlah besar hingga akhirnya mencapai kata sepakat pada jumlah 207 ekor. Jumlah tersebut tergolong besar ditambah dengan denda adat lainnya. Jika seekor babi dewasa di sana dihargai sekitar Rp.10.000.000,- maka diperkirakan biaya pengadaan babi sebagai denda adat ini mencapai nilai sekitar Rp.2.000.000.000,-. Namun, ketentuan adat seperti ini sebenarnya memiliki nilai positif, yaitu (1) Memberikan efek jera

kepada para pelaku, (2) Peringatan bagi yang lainnya agar lebih memperhatikan sikap dan perilaku keluarganya sendiri, dan (3) Agar kelak tidak menyusahkan keluarga besar mereka.

Dalam penyelesaian kasus-kasus kriminal yang melibatkan warga setempat, hukum negara dan hukum adat dijalankan bersamaan. Polisi sendiri masih sulit untuk mendidik masyarakat pegunungan mengenai masalah hukum dan sanksi pengadilan. Dalam setiap kesempatan, polisi telah mengingatkan bahwa pelaku akan mendapatkan hukuman yang setimpal di pengadilan sehingga tidak perlu menuntut uang ganti rugi dan babi dalam jumlah yang besar. Namun, hal tersebut sering tidak dihiraukan oleh warga. Bila belum ada kesepakatan antarpihak yang bertikai sehingga berpotensi terjadi perang suku, maka biasanya pemerintah setempat juga dilibatkan sebagai mediator antarkelompok warga yang berkonflik ini. Denda yang sudah diputuskan dalam hukum adat ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan besarnya hukuman dalam pengadilan negara.

Pada kasus pembunuhan tadi, saat pelaksanaan bayar denda adat, keluarga besar pihak korban (isteri) berdatangan dari berbagai penjuru Papua (karena ada yang sudah merantau). Bahkan, mereka yang datang berasal dari daerah terpencil yang belum terdapat jaringan komunikasi dan transportasi umum. Beberapa dari mereka berjalan kaki selama 2-3 hari menuju Tiom. Mobilisasi warga seperti ini bisa terjadi karena masih kuatnya ikatan sosial antarmereka sendiri.

Menurut keterangan polisi, jumlah kasus kriminal seperti pembunuhan relatif kecil di Kabupaten Lanny Jaya, seperti pada tahun 2018 hingga bulan Agustus, baru ada satu kasus suami bunuh isteri. Ada juga kasus perzinahan dan perkosaan dengan frekuensi kejadian tidak sampai lima kasus setiap tahunnya. Peristiwa bayar denda adat dengan sejumlah ekor babi sebenarnya tidak sering terjadi di daerah ini jika melihat kecilnya frekuensi kasus kriminal yang terjadi tetapi menjadi besar seakan-akan hal ini sering terjadi karena fantastisnya besaran tuntutan yang diajukan oleh pihak keluarga korban. Dapat dikatakan ikatan sosial dalam masyarakat kampung masih terpelihara dengan baik.

Penutup

Bupati yang juga OAP dan biasanya berasal dari suku setempat menjadi representasi 'pria berwibawa' (*bigman*) dalam pemerintahan di daerah pegunungan tengah. Bupati menjadi tokoh sentral dalam pembangunan di kabupaten. Dalam konflik besar antar suku pun unsur pemerintahan ikut dilibatkan (selain unsur adat).

Pembangunan di Kabupaten Lanny Jaya yang diterapkan oleh pemerintah kabupaten setempat lebih merupakan pembangunan yang mendorong masyarakat kampung menuju peradaban modern. Berbagai program pembangunan daerah mengadopsi program pembangunan nasional dan belum banyak menunjukkan kekhasan pembangunan Kabupaten Lanny Jaya, sebagai salah satu wilayah di pegunungan tengah Papua. Pemerintah daerah juga kurang memperhatikan modal budaya dan sosial warganya dalam menjalankan program-program pembangunan. OAP di Tiom lebih banyak berperan sebagai objek dan bukan subjek atau pelaku pembangunan. Sementara itu, sebagian dari pola hidup keseharian—dengan kata lain sebagian dari peradaban—OAP di Tiom, setelah beberapa waktu Kabupaten Lanny Jaya dibentuk, malah berkembang ke arah yang memprihatinkan.

Acknowledgement

Penelitian ini didanai oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Tahun Anggaran 2018.

Daftar Pustaka

- Amien, A.Mappadjantji. (2005). *Kemandirian Lokal, Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Anderson, Bobby. (2015). *Papua's Insecurity State Failure in the Indonesian Periphery*, Policy Studies 73, Honolulu: East West Centre.
- BAPPEDA Kabupaten Lanny Jaya. (2017). *Partisipasi Orang Asli Papua Dalam Pembangunan di Kabupaten Lanny Jaya 2017*, Tiom: BAPPEDA Kab. Lanny Jaya.

- BAPPEDA Kabupaten Lanny Jaya. (2018). *Lanny Jaya Dalam Angka 2017*. BPS Indonesia.
- Bobi, Willem. (2014). *Meregenerasi Manusia Asmat*, Nabire: Lembaga Pendidikan Papua.
- Diamond, Jared. (2015). *The World Until Yesterday (Dunia Hingga Kemarin), Apa yang Dapat Kita Pelajari dari Masyarakat Tradisional?*, Jakarta: KPG.
- Djojosoekarto, Agung, Rudiarto Sumarwono, dan Cucu Suryaman. (2008). *Kinerja Otonomi Khusus Papua*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.
- Djojosoekarto, Agung, dkk. (2012). *Nilai-Nilai Dasar Orang Papua Dalam Mengelola Tata Pemerintahan (Governance), Studi Refleksif Antropologis*, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Yogyakarta: Centre for Learning and Advancing Experimental Democracy and Indonesia Forestry and Governance Institute.
- Enembe, Lukas. (2016). *Papua Antara Uang dan Kewenangan*, Jakarta: RMBOOKS.
- Go M, Meity Fransisca. (2014). *Analisis Efisiensi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat*, Tesis, UGM, Yogyakarta.
- Hall, Gillette and Harry Patrinos. (2010). *Chapter 1: Introduction*, World Bank: Indigenous Peoples, Poverty and Development Draft Manuscript.
- Hettne, Bjorn. (1993). Ethnicity and development- An elusive relationship, *Journal Contemporary South Asia*, Vol.2, 1993, Issue 2, p.123-149.
- Jenks, Chris. (2013). *Culture Studi Kebudayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementerian PPN/BAPPENAS. (2013). *Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif*. Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian PPN/BAPPENAS.
- Kementerian PPN/BAPPENAS. (2015). *Rencana Strategis Bidang Pemerintahan Desa*. Rakornas Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pusat dan Daerah Tahun 2015, Jakarta, Rabu/29 Juli 2015.
- Koentjaraningrat, dkk. (1994). *Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk*. Jakarta: Djambatan.
- Lauer, Robert H. (2003). *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Melait, Meki. (2017). "Eitaken Herek": Hati Menurut Orang Huwula, *Studi Budaya Nusantara*, Vol.1 No.2 Desember 2017.
- Materay, Bernarda. (2012). *Nasionalisme Ganda Orang Papua*, Jakarta: Kompas.
- Modouw, James. (2013). *Pendidikan dan Peradaban Papua: Suatu Tinjauan Kritis Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Bajawa Press.
- Pigai, Benny Makewa. (2011). *Ekonomi Owaada Dimulai Dari Halaman Rumah Tiap Keluarga*, Jayapura: Deiyai.
- Reilly, Benjamin. (2004). State functioning and state failure in the South Pacific, *Australian Journal of International Affairs*, Vol. 58, No. 4, pp. 479-493, December 2004.
- Sari, Yulia Indrawati, Harmein Rahman, dan Dewi Ratna Sjari Manaf. (2011). *Laporan Final Evaluasi PNPM RESPEK: Infrastruktur Pedesaan dan Kapasitas Kelembagaan*. Bandung: Akatiga- Center for Social Analysis.
- Sastradipoera, Komaruddin. (2006). *Strategi Pembangunan Sumber Daya Berbasis Pendidikan Kebudayaan*, Bandung: Kappa-Sigma.
- Semboari, Yakop. (2012). *Pemberdayaan Kampung Bidang Perumahan dan Infrastruktur Dasar (Konteks Program Respek Papua)*, Studi di Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen di Papua, Tesis Program Studi Sosiologi, Universitas Gadjah Mada.
- Soeprapto, Tedjo. (2013). *Peran Kelompok Etnis Dalam Kepemimpinan Pada Pemda Provinsi Papua*, Jurnal Aplikasi Manajemen, Vol.11 No.2, Juni 2013, ISSN: 1693-5241, hlm.306-316.
- Sugandi, Yulia. (2013). The Notion of Collective Dignity among Hubula in Plaim Valley,

- Papua, *Doctor Dissertation*, Westfälischen Wilhelms-Universität.
- Suryawan, I Ngurah. (2017). *Papua Versus Papua*, Yogyakarta: Labirin.
- Suryawan, I Ngurah. (2014). Desain Besar Penataan Daerah Dan Dinamika Identitas Budaya di Provinsi Papua Barat, *Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin*, Vol. XXIII No. 3, 2014: 1-18.
- Susilo, Rachmad K. Dwi. (2012). *Sosiologi Lingkungan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Throsby, David. (2001). *Economic and Culture*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Turua, Untung. (2014). Model Pengembangan Kapasitas Ekonomi Petani Asli Papua Dalam Pembangunan Wilayah di Kabupaten Keerom, *Disertasi Doktor*, Institut Pertanian Bogor.
- UNDP. (2005). *Community Livelihoods and Civil Society Organisations in Papua, Indonesia, A Snapshot y Local Non-Government Organisations*.
- Wetipo, Wempi, dan Marthen Medlama. (2015). *Gunung versus Pantai, Dalam Perspektif Nilai-Nilai Hidup Bersama*, Yogyakarta: asdaMEDIA.
- Woolcock, Michael, and Deepa Narayan. (2000). *Social Capital: Implications for Development Theory, Research, and Policy*, World Bank Research Observer, Vol.15 (2), 2000.